

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah proses aktivitas yang dilakukan dengan sadar untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih maju . Dalam proses pembangunan membutuhkan unsur pendukung seperti finansial, teknologi dan manusia. Unsur terpenting diantara ketiganya adalah manusia .Sumber daya manusia yang berkompeten sangat dibutuhkan karena memiliki peranan penting dalam menentukan arah pembangunan . Manusia selaku subjek pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kualitasnya sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan . Kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan baik fisik maupun mental. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan , pelatihan dan pembinaan . Peran sinergi Pemerintah dengan stakeholders sangat dibutuhkan dalam membangun sumber daya manusia sejak dini.

Anak secara sederhana akan tumbuh besar kemudian dewasa. Anak merupakan salah satu unsur bangsa yang sangat berharga . Mereka adalah aset masa depan yang dapat mewujudkan tekad dan harapan bangsa. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelindungan Anak , mendeskripsikan anak sebagai penduduk berusia di bawah 18 tahun . Upaya pemenuhan hak anak secara konstitusi Indonesia mengatur peran strategi anak dengan mendukung hak anak dalam hidup , tumbuh kembang dan memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan . Hal tersebut karena anak sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa sudah seharusnya mendapatkan haknya dengan baik .

Indonesia menjadi bagian dari Deklarasi World Fit for Children (WFC) merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)) sebagai acuan . Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Upaya lainnya yakni perlindungan anak juga sudah termuat dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Komitmen pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak

dapat dilihat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak pengganti Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab pemenuhan hak anak Indonesia agar dapat mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. Indonesia Layak Anak (IDOLA) sendiri merupakan tujuan akhir (goals) yang akan dicapai dalam Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak . Tujuan tersebut sejalan dengan rencana PBB dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) (Ranguti & Maksu, 2019). Kabupaten / Kota Layak Anak atau biasa disingkat KLA merupakan sebuah kerangka peningkatan pembangunan wilayah dengan menggabungkan antara komitmen dan sumber daya pemerintah , masyarakat , dan dunia usaha , serta merencanakan kebijakan , rencana , dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mewujudkan hak - hak anak secara komprehensif dan berkesinambungan .

Tujuan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu menciptakan suatu kondisi yang dapat memberikan pemenuhan hak anak secara berkesinambungan. Kebijakan pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak memiliki lima klaster dan indikator capaian untuk menilai pemenuhan hak anak di setiap Kabupaten / Kota Klaster tersebut antara lain meliputi (1) Hak sipil dan kebebasan , (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif , (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan , (4) Pendidikan , pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya , dan (5) Perlindungan khusus . Penghargaan Kabupaten / Kota Layak Anak digolongkan atas KLA , Utama , Nindya , Madya , dan Pratama .

Terdapat 24 indikator penilaian pendukung kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Capaian indikator tersebut menjadi dasar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menilai penghargaan . dan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pemberian predikat kategori penghargaan Pada tahun 2019 , terdapat 432 Kabupaten / Kota yang ikut berkontribusi dalam upaya pemenuhan hak anak , akan tetapi hanya terdapat 247 keberhasilan memperoleh Kabupaten / Kota Layak Anak Angka tersebut merupakan peningkatan yang cukup signifikan yaitu 40 % , dibandingkan

tahun sebelumnya 177 Kabupaten / Kota Hal tersebut membuktikan bahwa komitmen para Pimpinan Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak anak bertambah banyak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , 2019)

Demak merupakan salah satu Kabupaten yang berkomitmen dalam pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak . Komitmen sebagai Kabupaten Layak Anak dimulai sejak 2019 dengan predikat Pratama . Upaya menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung hak - hak anak sudah termuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Komitmen lainnya dapat dilihat dengan adanya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang melibatkan seluruh elemen baik pemerintah , masyarakat dan dunia usaha. Hasil dari proses implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Demak berhasil mendapatkan penghargaan Madya pada tahun 2022. Hal tersebut karena Kabupaten Demak dapat memenuhi standar pencapaian Kabupaten Layak Anak sekitar 600 - 700 poin hal tersebut sesuai dengan penilaian yang memperoleh penghargaan Pratama pada tahun 2019 - 2021. Penghargaan yang diperoleh menjadi motivasi agar dapat meningkatkan pemenuhan dan perlindungan anak - anak di Kabupaten Demak dan diharapkan dapat memotivasi bagi Kabupaten / Kota lain.

Tabel 1. 1 Penghargaan Kota Layak Anak Kabupaten Demak

Tahun	Penghargaan
2019	Pratama
2020	Pratama
2021	Pratama
2022	Madya

Sumber : Diolah oleh peneliti

Penghargaan yang kini diperoleh merupakan sebuah kebanggaan dan tantangan agar dapat meningkatkan lingkungan yang mendukung terpenuhinya

hak anak. Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (P2PA) Kabupaten Demak selaku *leading sector* bertanggung jawab atas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan cakupan sosial kepada Bupati. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan adanya berbagai pelaksanaan program pada setiap klaster Kabupaten Layak Anak, meskipun pada faktanya banyak hak anak yang belum terpenuhi

Klaster pertama yaitu hak sipil dan kebebasan. Komitmen untuk mendukung peningkatan kepemilikan akte kelahiran bagi seluruh masyarakat khususnya anak, pemerintah menerbitkan

Pada klaster kedua, pernikahan usia anak masih menjadi isu utama karena memiliki jumlah kasus yang sangat tinggi di Kabupaten Demak. Berdasarkan data dari Kemenag Kabupaten Demak, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 62 dari pihak laki-laki dan 229 dari pihak perempuan permohonan surat dispensasi pernikahan. Angka tersebut naik signifikan setiap bulannya.

Tabel 1. 2 Angka Dispensasi Nikah

No	Kecamatan	Jenis Kelamin	
		Laki - laki	Perempuan
1	Bonang	10	33
2	Demak	2	44
3	Dempet	3	4
4	Guntur	6	32
5	Gajah	2	14
6	Karanganyar	7	18
7	Karangawen	8	1
8	Karantengah	1	0
9	Kebonagung	2	3
10	Mijen	1	0
11	Mranggen	10	37

12	Sayung	5	8
13	Wedung	1	14
14	Wonosalam	4	21
Jumlah		62	229

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Upaya menangani permasalahan pernikahan usia anak dilakukan melalui sosialisasi “Stop Kekerasan Anak” di Sekolah - sekolah dan Pondok Pesantren dan Program “Gerakan Kembali Bersekolah” (GKB) . Program tersebut belum dapat mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Demak. Hal tersebut karena angka pernikahan usia anak , dipengaruhi oleh pergaulan bebas dan dorongan keluarga sehingga anak belum siap menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga, baik mental maupun materi. Isu lain dalam klaster ini adalah infrastruktur ramah anak juga masih terbatas . Pemenuhan hak anak atas infrastruktur seperti ruang bermain ramah anak, trotoar, pedestrian, dan ruang terbuka hijau masih perlu ditingkatkan. Minimnya sarana dan prasarana seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Pada klaster ketiga terdapat beberapa indikator penilaian seperti persentase persalinan di faskes, prevelensi gizi , pemberian makan pada bayi dan anak, faskes dengan pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi, serta kawasan tanpa rokok. Kesehatan Ibu dan Anak merupakan salah satu isu prioritas di Kabupaten Demak.

Permasalahan lain pada klaster ketiga adalah masih terbatasnya kawasan tanpa rokok di Kabupaten Demak. Pemenuhan kawasan tanpa rokok adalah salah satu bentuk lingkungan yang memberikan kenyamanan pada sesama. Keberadaan kawasan tanpa rokok sangat dibutuhkan seperti di sekolah, kantor pelayanan, dan ruang publik lainnya. Terbatasnya kawasan tanpa rokok mewujudkan bahwa perlu upaya yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Pada klaster keempat terdapat indikator capaian meliputi wajib belajar 12 tahun, Sekolah Ramah Anak, PAUD - HI dan pusat kreativitas anak. Pemenuhan hak anak atas wajib belajar 12 Tahun dilakukan melalui Gerakan Kembali Bersekolah (GKB). Tujuannya adalah agar anak-anak kembali menempuh pendidikan di Sekolah bersama dengan teman-temannya. Program tersebut merupakan upaya mengatasi rendahnya Angka Partisipasi Sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang rendah salah satunya dipengaruhi oleh masalah ekonomi. Hal tersebut menjadi permasalahan serius karena hak anak dalam memperoleh pendidikan seharusnya dapat terpenuhi (Priyanti, 2018). Pemenuhan lain atas Sekolah Ramah Anak juga dilakukan melalui penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak di seluruh wilayah Kabupaten Demak. Jumlahnya yang sangat banyak pada setiap jenjang pendidikan, namun belum memberikan fasilitas ramah anak yang berstandar seperti Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS). Klaster kelima berkaitan erat dengan perlindungan anak korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas dan anak berhadapan hukum, terorisme, dan stigma. Upaya pemenuhan hak anak atas klaster ini yaitu melalui sosialisasi stop kekerasan anak pada Sekolah - Sekolah dan Pondok Pesantren. Program tersebut pada pelaksanaannya masih belum efektif mengatasi permasalahan seperti kasus kekerasan anak di Kabupaten Demak.

Gambar 1. 1 Gambar Grafik Korban Kekerasan Anak



Dari beberapa Kabupaten, kasus kekerasan anak yang ada di Demak cukup lumayan tinggi, yaitu sekitar 14 kasus, yang diperoleh pada tahun 2022, dan memenuhi peringkat 25 dari beberapa Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penelitian terdahulu, penulis mengambil berbagai referensi jurnal untuk mendukung teori dan bukti empiris dari penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu “Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak” yang ditulis oleh Darmini dan Laurensius. Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa partisipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan hak sipil dan layak anak menjadi Kota Layak Anak terbagi sesuai dengan 5 Klaster yang ada di Kota Layak Anak. Yang kedua yaitu “Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak dalam memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Pekanbaru”, dalam hasil penelitian yang sudah dilakukan menyebutkan bahwa implementasi dari kebijakan Kota Layak Anak terkait pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak sudah lebih baik dari sebelumnya, akan tetapi kategori tersebut masih jadi penilaian Kota Layak Anak pada umumnya. Dan yang terakhir dari “Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar”, dalam hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada beberapa puskesmas ramah anak yang tersebar di wilayah Surakarta, dan Makassar baru saja mencanangkan program Kota Layak Anak.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Demak perlu ditingkatkan agar upaya dalam pemenuhan hak anak dapat berkelanjutan. Langkah yang efektif perlu dilakukan, mengingat penghargaan yang diperoleh sebagai Kabupaten Layak

Anak tingkat nindya dapat dijadikan motivasi bagi Kabupaten Demak itu sendiri maupun bagi Kabupaten / Kota lain .

Berdasarkan berbagai uraian permasalahan tersebut , fokus peneliti mengarah pada bagaimana implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Demak dalam upaya pemenuhan hak - hak anak di Kabupaten Demak ,maka fokus lain peneliti juga mendeskripsikan dan dan mengetahui siapa saja stakeholder yang terlibat dan perannya di setiap klaster hak anak. Maka dari itu , peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul " Peran Stakeholder dalam Upaya Menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian rumusan masalah diangkat untuk mengungkap pola pikiran secara nyata dan jelas serta menyeluruh mengenai hakikat permasalahan tersebut, sehingga nantinya akan mudah untuk memahaminya

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

- 1) Apa saja stakeholder yang terlibat dalam Upaya Menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak?
- 2) Bagaimana Peran Stakeholder dalam Upaya Menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Mendeskripsikan apa saja stakeholder yang terlibat dalam Upaya Menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak
- 2) Menganalisis peran stakeholder dalam Upaya Menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu dan wawasan penulis mengenai bagaimana menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak

2. Bagi Universitas

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar koleksi ilmiah serta mampu untuk membantu teman - teman yang apabila nantinya mempunyai keinginan untuk meneliti topik tentang Kota Layak Anak di Kabupaten Demak

3. Bagi Pemerintah Kota Demak

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan Pemerintah Kota Demak mampu untuk menelaah kondisi dan keberlangsungan Kota Layak Anak serta mampu untuk mengelola sumber daya yang ada secara optimal, dan berguna untuk keberlangsungan jangka panjang.

4. Bagi Pihak Lain

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan referensi bagi penulis - penulis lainnya apabila membutuhkan informasi yang berkaitan dengan upaya menciptakan kota layak anak.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti / Judul Penelitian	Tujuan Penelitian dan Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian yang akan dilakukan
Peneliti: Moh Ilham A Hamudy Judul Penelitian: Upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar Sumber: Jurnal Bina Praja , Vol. 7 , No. 2 (2015)	Tujuan Penelitian: Berusaha menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota Makassar dan Surakarta dalam mewujudkan KLA Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah ada beberapa puskesmas ramah anak yang tersebar di wilayah Surakarta, dan kota Makasar baru saja mencanangkan program Kota Layak Anak	Penelitian pada jurnal ini lebih berfokus kepada kapasitas kelembagaan KLA, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap stakeholder KLA
Peneliti : Felika Andriani Saputri, dan Dr. Dewi	Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui strategi yang	Hasil Penelitian : Terjadi peningkatan kapasitas	Penelitian dalam jurnal ini adalah berfokus terhadap teori strategi, sedangkan fokus yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah lebih menganalisis

<p>Erowati, S.Sos , M. Si</p> <p>Judul: Strategi Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak di Kabupaten Kebumen Tahun 2019</p> <p>Sumber:</p>	<p>digunakan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengembangkan Kabupaten / Kota Layak Anak</p> <p>Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p>	<p>kelembagaan dan peningkatan kapasitas layanan yang ramah anak yaitu peningkatan pembentukan forum anak desa, pembentukan sekolah ramah anak, dan pembentukan puskesmas ramah anak</p>	<p>terkait stakeholder satu sama lain</p>
<p>Peneliti : Karya Widyawati dan Rita Laksmitasari</p> <p>Judul : Penilaian Ruang Bermain Anak di Kota Depok Sebagai Salah satu Indikator Tercapainya Kota Layak Anak</p> <p>Sumber</p>	<p>Tujuan Penelitian : Untuk melakukan penilaian kelayakan tempat bermain anak bagi dari sisi kuantitas ataupun kualitas sehingga akan tercapai pembangunan kota berdasarkan perspektif kota layak anak.</p> <p>Metode Penelitian : Survey Lapangan, , dan Wawancara</p>	<p>Hasil Penelitian : Keberadaan Taman Bermain di salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Tapos belum terfasilitasi sesuai standar Kota Layak Anak yaitu per RW harus ada taman bermain.</p>	<p>Penelitian pada jurnal ini lebih berfokus terhadap salah satu indikator yaitu mengenai fasilitas dari kota layak anak, sedangkan fokus dari penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai 5 kluster kota layak anak dari semua aspek</p>

<p>Peneliti : Mamluatun Ni'mah, M. Pd</p> <p>Judul : Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Probolinggo</p>	<p>Tujuan Penelitian: Untuk mendeskripsikan rencana implementasi dari pengembangan kota layak anak, serta faktor pendukung ataupun penghambat dari implementasi tersebut.</p> <p>Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil Penelitian : Hasil penelitiannya yaitu implementasi dari pengembangan kota layak anak menggunakan teori Darwin yaitu interpretasi, pengorganisasian, dan pengaplikasian.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada lokus penelitian masing - masing.</p>
<p>Peneliti : Darmini Roza dan Laurensius Arliman</p> <p>Judul : Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak</p>	<p>Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimana partisipasi pemerintah daerah untuk mewujudkan kota / kabupaten layak anak di Indonesia</p> <p>Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan hak sipil dan layak menjadi KLA terbagi sesuai dengan 5 klaster KLA</p>	<p>Penelitian dalam jurnal ini berfokus terhadap permasalahan daerah di seluruh Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokus di satu daerah yaitu Kabupaten Demak</p>
<p>Peneliti : Abdiana Ilosa, Rusdi</p>	<p>Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimana</p>	<p>Hasil Penelitian : Implementasi dari kebijakan Kota Layak</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan bahwa jurnal ini berfokus kepada hak sipil dan kebebasan anak, sedangkan penelitian yang akan</p>

<p>Judul : Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak dalam memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Pekanbaru</p>	<p>implementasi kota layak anak menyangkut pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak di Pekanbaru</p> <p>Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Anak terkait pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak sudah lebih baik dari sebelumnya, akan tetapi kategori tersebut masih jadi dari penilaian Kota Layak Anak pada umumnya</p>	<p>dilakukan penulis terkait 5 kluster kota layak anak pada umumnya</p>
<p>Peneliti : M. Tegar Tomi Liwananda</p> <p>Judul : Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak dan Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Semarang</p>	<p>Tujuan Penelitian : Untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan Kota Layak Anak khususnya dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan anak , dan mengetahui apa saja kendalanya.</p> <p>Metode Penelitian : Kualitatif</p>	<p>Hasil Penelitian : Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Anak belum bisa dikatakan memenuhi target</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai peran stakeholder, dan penelitian ini berfokus kepada studi evaluasi</p>
<p>Peneliti : Syaeful Bakhri, Cucu Herawati, Wardah</p>	<p>Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui prospek dan tantangan</p>	<p>Hasil Penelitian : Strategi kombinasi dengan prioritas</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih berfokus terhadap peran stakeholder , serta lokus yang dituju pun berbeda</p>

<p>Nuroniayah</p> <p>Judul : Prospek dan Tantangan Kabupaten Kota Layak Anak di Kabupaten Cirebon</p>	<p>Kabupaten Cirebon menuju Kabupaten Kota Layak Anak dengan kategori yang lebih baik</p> <p>Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif</p>	<p>tertinggi yaitu Strength - Opportunity (SO) , disusul Weakness - Opportunity (WO) , kemudian Strength - Threat (ST) , dan Weakness - Threat (WT) , dengan strategi yang dimaksud adalah memaksimalkan kekuatan dari peluang untuk mendukung berjalannya rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cirebon</p>	
<p>Peneliti : Ulfiona Rizki Ashari, Hanang Ilham Yohana, Astari Lutviana Devi, Fahrur Rosyid</p> <p>Judul : Optimalisasi Strategi</p>	<p>Tujuan Penelitian : Untuk menganalisis perlindungan hak - hak anak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dan merumuskan strategi</p>	<p>Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pemenuhan KLA b, dilakukan secara bersinergi dengan SKPD di Kota Batu. Strategi perlindungan anak secara langsung</p>	

<p>Pemerintah Daerah Kota Batu menuju Kota Layak Anak melalui Perlindungan Hak - Hak Anak</p>		<p>dilakukan secara paralegal dan vocal point. Sedangkan strategi perlindungan anak secara tidak langsung meliputi pengadaan regulasi</p>	
<p>Peneliti : Amelia Alias, Nurfadilla Mohamad Nasri, dan Mohd Mahzan Awang</p> <p>Judul : A Tracer Study on Child Participation in Child Councillor Programmes Aimed towards Development of the Child Friendly Cities Initiative</p>	<p>Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui partisipasi anggota dewan anak dalam keikutsertaan dengan cara Model Partisipasi Anak Lundy</p> <p>Metode Penelitian : Literatur Review</p>	<p>Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anak dalam perwakilan Dewan Anak di Malaysia masih tergolong lemah. Hal ini perlu ditingkatkan antara dinamika kekuatan anak dan orang dewasa sehingga anak dapat lebih berperan aktif dalam pengambilan keputusan</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih berfokus terhadap peran stakeholder dalam menciptakan kota layak anak di wilayah Kabupaten, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus dengan partisipasi anak.</p>
<p>Peneliti : Viviana A. Cordero-Vinueza,</p>	<p>Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengetahuan dan</p>	<p>Hasil Penelitian : Hasil temuan menunjukkan tiga</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih berfokus terhadap peran stakeholder dalam menciptakan kota layak anak di wilayah Kabupaten,</p>

<p>Femke Nierkek, dan Terry van Dijk</p> <p>Judul : Making child-friendly cities: A socio-spatial literature review</p>	<p>kesenjangan yang ada tentang keramahan anak dalam lingkup kota sosio - spasial</p> <p>Metode Penelitian : Literatur Review</p>	<p>dimensi kota layak anak adalah hak, lingkungan fisik, dan tata kelola</p>	<p>sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada tinjauan kelayakan anak dalam lingkup kota sosio spasial</p>
<p>Peneliti: Sabirah Adams, Shazly Savahl , Maria Florence, dan Kyle Jackson</p> <p>Judul : Considering the Natural Environment in the Creation of Child-Friendly Cities: Implications for Children's Subjective Well-Being</p>	<p>Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui eksplorasi dari ruang alam dan dampaknya pada kesejahteraan subjektif anak</p> <p>Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak mempertimbangkan ruang alami sebagai satu hal penting dalam membangun kota layak anak, dan juga memanfaatkan untuk komunitas mereka</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih berfokus terhadap peran stakeholder dalam menciptakan kota layak anak di wilayah Kabupaten, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada aktifitas ruang alami untuk perkembangan anak.</p>
<p>Peneliti : Nabil Mohareb, Eslam Elsamahy, dan Mary Felix</p>	<p>Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui kapasitas dan merancang kerangka</p>	<p>Hasil Penelitian : Yang perlu disoroti adalah partisipaso kaum muda,</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih berfokus terhadap peran stakeholder dalam menciptakan kota layak anak di wilayah Kabupaten, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada</p>

<p>Judul : A Child - Friendly City : A Youth Creative of Vision of Reclaiming Interstitial Space In El Mina (Tripoli, Lebanon)</p>	<p>partisipasi pemuda sebagai visi untuk kota layak anak</p> <p>Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif</p>	<p>penggunaan ruang interstitial secara adaptif, dari berbagai stakeholder</p>	<p>pendapat anak dalam menciptakan lingkungan kota layak anak</p>
<p>Peneliti : Young Hee Lee, Mi Na Lee</p> <p>Judul : A Study on the Plan for the Creation of a Child Friendly City according to the UN Convention on the Rights of the Child</p>	<p>Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui apakah anak - anak dan remaja hidup dengan rasa puas dengan mengakui hak - hak mereka di lingkungan yang mereka tinggali</p> <p>Metode Penelitian : Survey Kualitatif</p>	<p>Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bahwa intervensi dan pendekatan perencanaan yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek pendidikan, keselamatan dan perlindungan, bermain dan rekreasi, kesehatan dan pelayanan sosial, dan lain - lain harus dilaksanakan untuk menciptakan kota layak anak</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih berfokus terhadap peran stakeholder dalam menciptakan kota layak anak di wilayah Kabupaten, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus terhadap pemenuhan hak anak di lingkungan sekitar</p>

Sumber: Diolah dari berbagai sumber jurnal

1.5.2 Administrasi Publik

Secara sederhana, administrasi publik adalah studi tentang bagaimana mengelola organisasi publik. Menurut Dimock dan Dimock (anggara, 2016:134), administrasi publik adalah bagian dari administrasi umum, dan administrasi umum memiliki bidang yang lebih luas, yaitu ilmu yang mempelajari apa yang diinginkan masyarakat melalui pemerintah dan bagaimana mendapatkannya.. Henry (anggara, 2016:360) menuliskan perkembangan ilmu administrasi publik sebagai berikut :

1. Paradigma Dikotomi Politik Administrasi (1900-1926)

Paradigma dikotomi Politik administrasi ini diprakarsai oleh Wilson, Goodnow dan Leonard D. White yang mengungkapkan bahwa politik harus fokus pada kebijakan dari kebutuhan rakyat sehingga perlu adanya pemisahan antara administrasi dan politik. Politik sebagai pembuat kebijakan pemerintahan dan administrasi bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan politik tersebut. Dalam paradigma ini administrasi harus dilihat sebagai sesuatu yang bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari birokrasi pemerintahan.

2. Paradigma Prinsip – Prinsip Administrasi (1927-1937)

Prinsip-prinsip administrasi ini dikemukakan oleh Wilioughby, Gullick dan Urwick, dan dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Taylor dan Fayol. Paradigma ini mengandung pemahaman tentang prinsip-prinsip pengelolaan administrasi dan menetapkan bahwa pengelolaan administrasi tidak boleh disamakan dengan yang lain. Dalam perkembangannya, pemerintah juga menolak asumsi dikotomi politik administrasi, dan menyadari bahwa administrasi publik bukanlah sesuatu yang bebas nilai, imparial dan apolitis, melainkan sarat akan nilai administratif dibandingkan dengan politik.

3. Paradigma Administrasi Negara sebagai ilmu politik (1950-1970)

Paradigma Administrasi Negara ini dipengaruhi oleh berbagai opini politik, bahkan para ahli mencoba memperbaharui definisi dari administrasi publik yaitu *governmental bureaucracy*. Paradigma ini memandang administrasi publik sebagai ilmu politik, yang lokusnya dalam birokrasi pemerintahan, namun fokusnya kabur, karena prinsip-prinsip administrasi tidak memberikan solusi tentang fokus yang dapat digunakan dalam administrasi publik.

4. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Dalam paradigma ini, prinsip-prinsip manajemen dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Dalam paradigma ini, berbagai ilmu manajemen disediakan dalam administrasi publik, seperti teknik manajemen kepemimpinan, motivasi, komunikasi, penganggaran, audit, pemasaran, dll. Ini merupakan hal baru dalam ilmu politik dan administrasi. Arah pembangunan yang muncul dalam paradigma ini berorientasi pada psikologi sosial dan kebijakan publik. Diasumsikan bahwa semua fokus yang dikembangkan dalam paradigma ini berlaku untuk administrasi publik, sehingga lokusnya tidak jelas.

5. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970an)

Paradigma terakhir yang ditulis oleh Henry (1975) menegaskan bahwa administrasi publik adalah ilmu administrasi publik yang di dalamnya terdapat berbagai konsep ilmu. Paradigma ini memiliki fokus dan fokus yang jelas. Paradigma administrasi publik berfokus pada teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya pada isu dan kepentingan publik.

Di dalam perspektif teoritik juga telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional (*old public administration*) ke model manajemen publik baru (*new public management*), dan akhirnya menuju model pelayanan publik baru (*new public service*) menurut Denhardt dan Denhardt (Hardiansyah, 2018) yaitu:

a. Old Public Administration

Old Public Administration pertama kali dikemukakan oleh presiden Amerika Serikat yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Politik, Wilson. Beliau mengatakan, bidang administrasi sama dengan bidang komersial atau bisnis. Kemudian muncullah OPA, yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan dan pemberian layanan secara netral dan profesional dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Paradigma OPA tidak lepas dari tiga gagasan, yaitu paradigma dikotomi politik-administrasi, model rasional Herbert Simon, dan teori pilihan publik.

Pertama, paradigma dikotomi politik-administrasi yang berupaya mengedepankan gagasan Henry untuk memisahkan politik dari administrasi, yang menjadi kunci dikotomi politik-administrasi ada dua, yaitu:

1. Politik berbeda dengan administrasi.

Politik adalah tempat pengambilan kebijakan, sehingga administrasi tidak berhak memasuki bidang ini. Pejabat politik bertanggung jawab untuk memperjelas kepentingan publik dan merumuskannya sebagai produk politik dalam bentuk kebijakan. Administrasi hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan ini. Oleh karena itu, fungsi politik dan administrasi harus dipisahkan untuk menghindari pengaruh timbal balik. Badan eksekutif (administrasi) tidak boleh dicemari oleh kepentingan politik agar birokrasi menjadi profesional dan netral dalam menjalankan kebijakan publik.

2. Pimpinan di semua tingkatan dalam organisasi administrasi harus mampu mengatur struktur dan strategi organisasi yang efektif dan efisien.

OPA tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip manajemen ilmiah Taylor dan manajemen klasik POSDCORB oleh Gullick. Administrasi negara harus benar-benar berorientasi pada efisiensi. Semua sumber daya seperti tenaga kerja, sumber daya material, mesin, uang, metode, dan pasar digunakan untuk mewujudkan prinsip-prinsip efisiensi.

Aparat pemerintah harus bertindak sesuai dengan pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan sangat kaku sehingga tidak ada cela bagi birokrat menggunakan diskresinya karena dikhawatirkan dapat mengurangi efisiensi. Dalam struktur organisasi, tugas atasan (*top management*) adalah mengontrol bawahan dengan birokrasi top down dan memiliki kekuasaan untuk menghukum bawahan yang melalaikan pekerjaannya sebagaimana mestinya.

Kedua, manusia rasional (administratif) Simon berdampak pada OPA. Simon percaya bahwa manusia akan terpengaruh oleh akal ketika mereka ingin mencapai tujuannya. Rasionalitas ini hampir sama dengan efisiensi yang dikemukakan oleh aliran manajemen ilmiah. Orang yang bertindak rasional disebut administrator, dan administrator adalah orang yang berperilaku rasional untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi. Orang yang bekerja dalam suatu organisasi memiliki motivasi pribadi yang harus dipenuhi oleh organisasi. Tujuan pribadi ini tidak selalu berupa uang, tetapi mungkin juga keinginan untuk dihormati dan dihargai, serta keinginan untuk menunjukkan jati diri.

Ketiga, teori pilihan publik (*public choice*) merupakan teori yang melekat dalam OPA. Teori pilihan publik diturunkan dari filosofi manusia dalam teori ekonomi. Ide inti dari teori pilihan publik adalah bahwa manusia adalah individu yang rasional, mereka selalu ingin memenuhi kebutuhan pribadinya (*self-interest*) dan memaksimalkan kepentingan pribadinya (*self-use*). Menurut teori pilihan publik, manusia akan selalu mencari keuntungan tertinggi dalam setiap situasi saat pengambilan keputusan. Manusia adalah makhluk ekonomi, dan mereka selalu mencari keuntungan pribadi melalui serangkaian keputusan yang dapat memberikan keuntungan terbesar.

Di dalam bukunya "*The Study of Administration*", Wilson berpendapat bahwa masalah utama yang dihadapi pemerintahan administratif adalah kapasitas administrasi yang rendah. Untuk membangun birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien,

penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan pembenahan dengan meningkatkan profesionalitas penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang reformasi birokrasi diperlukan melalui pembentukan lembaga publik yang profesional, dan subjek utama pemikiran Wilson adalah lembaga atau birokrasi yang netral secara politik. Administrasi negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen ilmiah dan terpisah dari kepentingan politik. Inilah yang disebut konsep dikotomi politik dan administrasi. Administrasi negara merupakan pelaksanaan hukum publik secara detail dan terperinci, karena itu menjadi bidangnya birokrat teknis Sedangkan politik menjadi bidangnya politisi.

Keuntungan dari administrasi publik klasik adalah bahwa politik tidak akan mengganggu aktivitas administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, kegiatan administratif tidak akan membawa hasil politik kepada publik. Administrasi publik klasik juga menciptakan birokrasi dengan tingkat stabilitas yang tinggi, karena birokrasi ditentukan berdasarkan pertimbangan obyektif, birokrasi dilindungi oleh penyalahgunaan hukum, dan masa depan birokrat terjamin. Struktur birokrasi yang kompleks dan formal berdasarkan dokumen resmi akan menghindarkan birokrasi dari penyalahgunaan wewenang baik oleh birokrasi karier maupun birokrasi politisi yang berkuasa dalam jangka waktu tertentu. Administrasi publik klasik ini juga dapat diterapkan di negara yang berbentuk kerajaan. Selain itu, sifat netral administrasi publik klasik ini dapat mencegah birokrasi mengambil keuntungan dari individu atau kelompok tertentu.

Di dalam hal ini, *Old Public Administration* dicirikan oleh kegiatan pemerintah dan memberikan layanan kepada masyarakat oleh administrator publik yang bertanggung jawab dan akuntabel. Nilai dasar utama yang diadvokasi oleh administrasi publik model lama adalah efisiensi dan rasionalitas, yang merupakan sistem tertutup. Fungsi

administrator publik didefinisikan sebagai perencanaan, organisasi, kepegawaian, bimbingan, koordinasi dan penganggaran.

b. New Public Management (NPM)

NPM secara umum dianggap sebagai metode dalam manajemen publik yang menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam manajemen bisnis dan disiplin ilmu lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan publik dalam birokrasi modern. Administrasi publik mulai memperkenalkan Manajemen Publik Baru (NPM), yang merupakan paradigma baru di tahun 1990-an. Istilah NPM pertama kali dikemukakan oleh C. Hood dalam artikelnya "All Public Management in All Seasons". Nama New Public Management sering disebut dengan nama lain, seperti paradigma pasca birokrasi dan *reinventing government*. Paradigma NPM memiliki konsep yang berkaitan dengan manajemen kinerja di sektor publik, dan pengukuran kinerja merupakan salah satu prinsipnya.

NPM mengacu pada serangkaian ide dan praktik kontemporer yang menggunakan metode di sektor swasta atau komersial di organisasi sektor publik. Kekakuan yang dianut OPA yaitu pemerintahan yang terpusat, harus diganti dengan pemerintahan yang berwirausaha. NPM menganjurkan pengalihan fungsi pemerintah ke sektor swasta. Inti dari doktrin NPM dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengundang pemerintah untuk meninggalkan model pengelolaan administrasi tradisional dan menggantinya dengan kinerja atau hasil kerja.
2. Pemerintah harus menyingkirkan birokrasi tradisional dan membuat situasi dan kondisi organisasi, karyawan dan pekerja lebih fleksibel.
3. Tentukan tujuan dan indikator organisasi dan personel dengan lebih jelas, sehingga hasilnya dapat diukur melalui indikator yang jelas.
4. Staf senior lebih berkomitmen secara politik pada pemerintahan sehari-hari daripada netralitas.

5. Fungsi pemerintah untuk memperhatikan pasar dan menerbitkan kontrak karya, artinya penyediaan layanan tidak selalu dilakukan melalui birokrasi, tetapi dapat disediakan oleh swasta.
6. Mengurangi fungsi pemerintah melalui privatisasi.

c. New Public Service (NPS)

New Public Service merupakan paradigma yang didasarkan pada nilai-nilai kehidupan sosial. Peran pemerintah adalah mengkolaborasikan nilai-nilai yang ada agar sejalan dengan kebutuhan sosial. Sistem nilai masyarakat yang dinamis, membutuhkan pelayanan pemerintah yang berkualitas. Peran pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan administrasi memiliki prinsip sebagai berikut:

- a. Administrator publik mendengarkan lebih dari sekedar berbicara, dan melayani lebih dari sekedar mengarahkan.
- b. Berkolaborasi melalui jaringan kerja (network).
- c. Akuntabilitas dan transparansi disertai dengan tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan publik.
- d. Sebagai warga negara, masyarakat berperan aktif dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik.
- e. Pemerintah harus berkewajiban untuk melayani masyarakat.

Perspektif layanan publik yang baru telah membawa reformasi administrasi publik. Perubahan ini melibatkan perubahan dalam pemahaman masyarakat tentang prosedur pemerintah, perubahan pemahaman tentang arti kepentingan publik, perubahan cara-cara dimana kepentingan tersebut dipegang, dan perubahan cara administrator publik menjalankan tugasnya untuk mewujudkan kepentingan publik. Pandangan ini menekankan status masyarakat sebagai warga negara dalam konteks pemerintahan. Pandangan ini mengarah pada upaya untuk mendemokratisasi administrasi publik. Melayani masyarakat merupakan tugas utama pengelola publik, sekaligus fasilitator dalam merumuskan kepentingan publik dan partisipasi publik dalam pemerintahan. Pandangan

ini pun mengakui bahkan menuntut partisipasi masyarakat di semua tingkat pemerintahan, termasuk daerah.

Denhardt & R.B. Denhardt menekankan pada Departemen Pelayanan Publik Baru (PPB) bahwa karena paradigma ini, pemerintah seharusnya tidak beroperasi seperti perusahaan, tetapi harus melayani masyarakat secara demokratis, adil, berkeadilan, tidak diskriminatif, jujur, dan bertanggung jawab karena bagi paradigma ini;

1. Nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan kepentingan umum merupakan fondasi utama dalam proses pemerintahan;
2. Nilai-nilai tersebut memberikan motivasi bagi pegawai pemerintah atau PNS untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih adil, jujur dan bertanggung jawab.

1.5.3 Manajemen Publik

Manajemen adalah proses yang dilalui organisasi, mulai dari perencanaan hingga pemantauan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi. Menurut Hasibuan (Hariani, 2013:8) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber-sumber lainnya (perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan rangkaian kegiatan yang disiapkan untuk mencapai tujuan. Selain itu, menurut definisi Koontz dan Donnel dalam bukunya "*Principles of management*" (Hariani, 2013) manajemen mengacu pada pekerjaan orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan upaya anggota suatu organisasi dan menggunakan semua organisasi lain. Di dalam hal ini yang dimaksud dengan proses adalah cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Menurut Light (Hariani, 2013) manajemen biasanya berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penataan, pembinaan, pemberian insentif, komunikasi dan kegiatan pengambilan keputusan setiap

organisasi untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat secara efektif menghasilkan produk atau layanan. Dalam konteks pengelolaan publik, barang dan jasa yang dihasilkan tidak berupa keuntungan tetapi dalam bentuk pelayanan publik.

Berdasarkan sudut pandang di atas, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa manajemen publik meliputi penetapan tujuan dan rencana bagaimana mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan dan memaksimalkan sumber daya yang ada, difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Berikut rincian fungsi manajemen yang disingkat POSDCORB:

- a. *Planning*: Proses pengambilan keputusan tentang kapan dan tujuan apa yang harus dicapai di masa depan serta apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut meliputi dua elemen (1) menetapkan tujuan, dan (2) menentukan aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi ini menghasilkan dan mengintegrasikan tujuan, strategi, dan kebijakan.
- b. *Organizing*: Proses pembagian kerja yang disertai dengan desentralisasi (pendelegasian wewenang). Organisasi sangat berguna dalam memberikan informasi tentang ruang lingkup wewenang, sehingga setiap anggota organisasi dapat mengetahui kepada siapa dia memerintah dan dari siapa menerima perintah. Organisasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi kerja, dan bekerja sama akan memberikan output yang lebih banyak daripada bekerja sendiri. Selain itu, organisasi juga dapat meningkatkan komunikasi dan dapat dengan jelas menggambarkan struktur organisasi saluran komunikasi antar anggota.
- c. *Staffing*: Proses mendapatkan tenaga atau personel secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- d. *Directing*: Suatu tugas yang kontinu untuk membuat keputusan dan mengaturnya dalam aturan dan instruksi khusus atau umum, dan bertindak sebagai kepala organisasi.

- e. *Coordinating*: Proses pengintegrasian kegiatan, sasaran, atau tujuan berbagai unit kerja dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien. Tanpa koordinasi, individu akan bekerja ke arah yang berbeda dengan ritme atau kecepatan yang berbeda. Demikian pula, tanpa adanya koordinasi, setiap orang mengambil kepentingannya sendiri sebagai tanggung jawabnya sendiri dan mengorbankan kepentingan seluruh organisasi.
- f. *Reporting*: Aktivitas seorang administrator untuk menyampaikan informasi tentang apa yang terjadi kepada atasannya, termasuk aktivitas yang memungkinkan dia dan bawahannya untuk tetap mendapat informasi melalui laporan, penelitian, dan inspeksi.
- g. *Budgeting*: Semua kegiatan yang dilakukan dalam bentuk perhitungan rencana dan pengendalian anggaran.

1.5.4 Stakeholder

Freeman dalam Hanida et al. (2017) menyatakan bahwa stakeholder merupakan setiap kelompok atau individu yang dapat memberikan pengaruh atau dapat menerima pengaruh oleh pengejawantahan ambisi atau sasaran organisasi. Sejalan dengan definisi tersebut, menurut Kadiwarka dalam Kismartini, Kustarto, dan Priyadi (2019) menyatakan bahwa stakeholder merupakan seluruh pihak termasuk individu maupun kelompok yang dapat menerima pengaruh maupun memberikan pengaruh dalam suatu keputusan serta dalam mencapai tujuan dalam suatu aktivitas. Menurut Ronald, stakeholder adalah pelaku yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh ambisi atau sasaran organisasi pada level yang berbeda-beda, level tersebut memiliki tiga komponen dasar yaitu legitimasi, kekuatan dan kepentingan Hanida dkk. (2017)

Menurut Schmeer dalam (Arrozaaq, 2018) stakeholder dalam proses meliputi individu, suatu kelompok atau organisasi yang memiliki ketertarikan dalam kebijakan yang sedang dipublikasikan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Hertifah Arrozaaq (2018) menyatakan bahwa stakeholder dapat diklasifikasikan sebagai individu, kelompok organisasi yang memiliki kebutuhan baik laki-laki

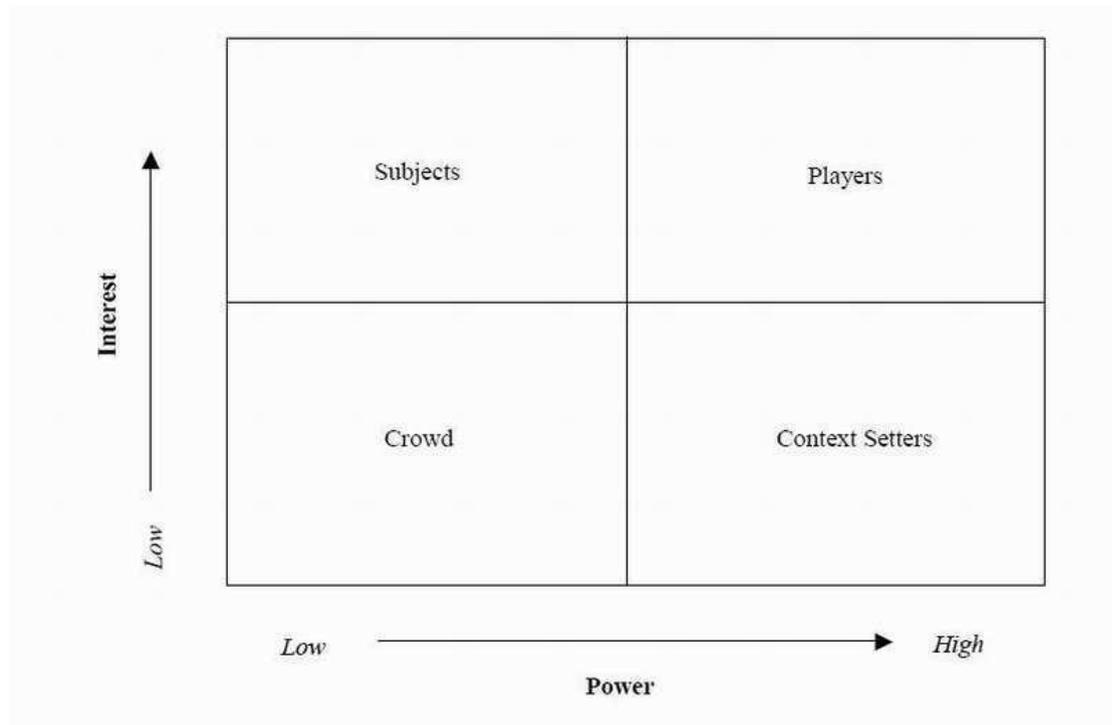
maupun perempuan , ikut berpartisipasi atau dipengaruhi oleh suatu aktivitas proyek pembangunan . Berdasarkan pengertian stakeholder dari berbagai ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa stakeholder dapat meliputi individu ataupun kelompok yang saling mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu tujuan organisasi, proyek yang sedang dilakukan ataupun kebijakan.

Menurut Kismartini dan Yusuf (2015) analisis stakeholder merupakan proses terstruktur untuk memperoleh dan menganalisis stakeholder baik itu individu, kelompok dan organisasi. Menurut Soesilo (Susilo dkk,2019) Tekanan dalam upaya atau aktivitas yang mengikutsertakan stakeholder harus terlebih dahulu mengetahui siapa yang menjadi stakeholder utama . Hal tersebut disebabkan karena banyaknya stakeholder yang dimiliki dengan masing-masing pekerjaannya serta memiliki tujuan utama saling membantu dan melakukan kolaborasi agar tujuan program dapat tercapai. Sedangkan menurut Benjamin dalam Kismartini dan Yusuf (2015) stakeholder diklasifikasikan menjadi tiga kelompok , yaitu 1) stakeholder kepentingan utama yaitu pihak yang mendapatkan pengaruh yang bersifat positif dan negatif (diluar kemauan) dan kegiatan , 2) stakeholder pendukung yaitu pihak penengah dalam membantu proses pelaksanaan program atau kebijakan seperti LSM , swasta dan organisasi pemerintah , dan 3) stakeholder kunci yaitu pihak yang memiliki pengaruh besar dalam permasalahan , kebutuhan , dan perhatian terhadap keberlangsungan kegiatan . Pemetaan stakeholder atau penyusunan stakeholder adalah sistem kolaboratif penelitian , debat , dan diskusi yang diambil dari berbagai pandangan untuk memutuskan susunan stakeholder utama di seluruh lingkup stakeholder (Dolfing 2018) . Pemetaan stakeholder membutuhkan guna menganalisis tujuan utama permasalahan atau suatu isu terkait , serta mengetahui aktivitas menghubungi stakeholder yang dilakukan melalui forum diskusi atau wawancara (Susilo et al . 2019) . Menurut Dolfing (2018) proses terjadinya stakeholder akan membantu untuk mengidentifikasi beberapa hal seperti :

- a . Tujuan utama dari pihak yang menginisiasi suatu kebijakan program
- b . Kepentingan tiap stakeholder
- c . Kesuksesan kebijakan / program

- d . Efektivitas rencana komunikasi
 - e . Mekanisme untuk mendorong stakeholder lainnya :
 - f . Resiko potensial ;
 - g. Orang - orang penting untuk diberitahu terkait program kebijakan selama pelaksanaan kebijakan / program berjalan ; dan
 - h . Stakeholder yang negatif serta dampak buruknya terhadap kebijakan program .
- Teknik pemetaan stakeholder yang dikemukakan oleh Bryson (2003) yakni dengan analisis Power (Kekuatan) dan Interest (Kepentingan) . Teknik ini menyusun stakeholder pada matriks dua kali dua di mana dimensinya adalah stakeholder kepentingan dalam organisasi atau permasalahan yang dihadapi dan dimensi kekuatan atau pengaruh yang dapat memengaruhi organisasi atau permasalahan masa depan. Interest merupakan kepentingan stakeholder terhadap jalannya kebijakan (Putri ,2018) .
- Menurut Grimble dalam Nurfatriani et al. (2015) , kepentingan dan agenda stakeholder dapat diukur dari kepentingan stakeholder , dampak / efek potensial , tingkat kepentingan relatif dan pengaruh kelompok , sedangkan Kekuasaan merupakan kekuatan atau pengaruh yang dimiliki oleh stakeholder dalam membuat kebijakan atau program (Putri,2018) . Pengaruh atau kekuasaan dilihat mengikuti kriteria yaitu memiliki kewenangan atau otoritas dalam membuat kebijakan atau program , memfasilitasi perwujudan program dan mempengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan atau program menurut Nurfatriani et al. (2015)

Gambar 1. 2 Bagan Pemetaan Stakeholder menggunakan Power and Interest menurut Bryson



Sumber : *Bryson (2003)*

Penjelasan bagan di atas sebagai berikut :

Contact Setter merupakan stakeholder yang memiliki power tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan tetapi interest yang dimiliki rendah

Players merupakan stakeholder yang memiliki power dan interest yang tinggi

Subject merupakan stakeholder yang memiliki interest tinggi tetapi power rendah

Crowd merupakan stakeholder yang memiliki interest dan power yang rendah

Teknik Power versus Interest ini dilakukan guna menyokong penentuan kekuasaan dan kepentingan stakeholder mana saja yang harus diperhitungkan guna menangani permasalahan yang dihadapi

Teknik ini juga melihat kerjasama mana yang harus didorong atau dilemahkan, sikap apa saja yang patut dibangun dan teknik ini juga memberikan informasi untuk meyakinkan pemangku kepentingan untuk mengubah pandangan mereka.

1.5.5 Peran Stakeholder

Pengertian peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Talakua (2018) adalah sesuatu yang merupakan bagian atau memegang pimpinan terutama ketika suatu peristiwa terjadi . Menurut Sockanto dalam Susilo et al. (2019) peran

merupakan aspek dinamis kedudukan (status) . Syarat - syarat peran terdiri dari tiga hal , yaitu :

a . Peran terdiri dari hubungan norma - norma dengan posisi seseorang di tengah - tengah masyarakat . Peran yang dimaksud dalam hal ini berarti kumpulan regulasi yang dapat mengarahkan seseorang dalam menjalani hidup didalam bermasyarakat .

b . Peran adalah suatu rancangan kegiatan apa yang dapat dilakukan . oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c . Peran adalah suatu proses sistematis yang muncul karena suatu kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan tidak bisa hidup sendiri.

Menurut Pedoman Pelaksanaan Good Public Governance dalam Susilo et al. (2019) , ada beberapa indikator dalam memaksimalkan pelaksanaan peran yang harus dilaksanakan oleh pemerintah , swasta dan masyarakat .

Peran stakeholder menurut Nugroho dalam Setiawan dan Nurcahyanto (2020) mengklasifikasikan peran stakeholder sebagai berikut :

a Policy creator , merupakan stakeholder yang memiliki peran dalam mengambil suatu keputusan dan menentukan kebijakan atau program

b . Koordinator, merupakan stakeholder yang memiliki peran dalam melakukan koordinasi dengan stakeholder lain yang ikut serta terlibat dalam kebijakan atau program.

c. Fasilitator, merupakan stakeholder yang memiliki peran memberikan fasilitas dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.

d . Implementor , merupakan stakeholder yang memiliki peran melaksanakan kebijakan atau program .

e . Akselerator , merupakan stakeholder yang memiliki peran dalam mempersingkat dan memberikan sokongan agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan atau dapat lebih cepat dari waktu yang direncanakan

1.5. 6 Kota Layak Anak

Kabupaten / Kota Layak Anak atau biasa disingkat KLA ialah sistem pembangunan kabupaten / kota yang berlandaskan hak anak melalui

pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah , masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan , program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah .

Dasar kebijakan pengembangan Kabupaten / Kota Layak sudah termuat pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak Hak anak menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia . Pemerintah , orang tua dan masyarakat , wajib menjamin , memenuhi dan melindungi hak anak tersebut .

Unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan di daerah terdiri atas Gubernur , Bupati atau Walikota , dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya Terdapat pula Gugus Tugas KLA sebagai lembaga yang berfungsi untuk berkoordinasi , merancang dan melaksanakan program baik di tingkat nasional ataupun provinsi dan kabupaten / kota . Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mempunyai tim evaluator untuk membantu mengevaluasi pelaksanaan KLA di seluruh Indonesia .

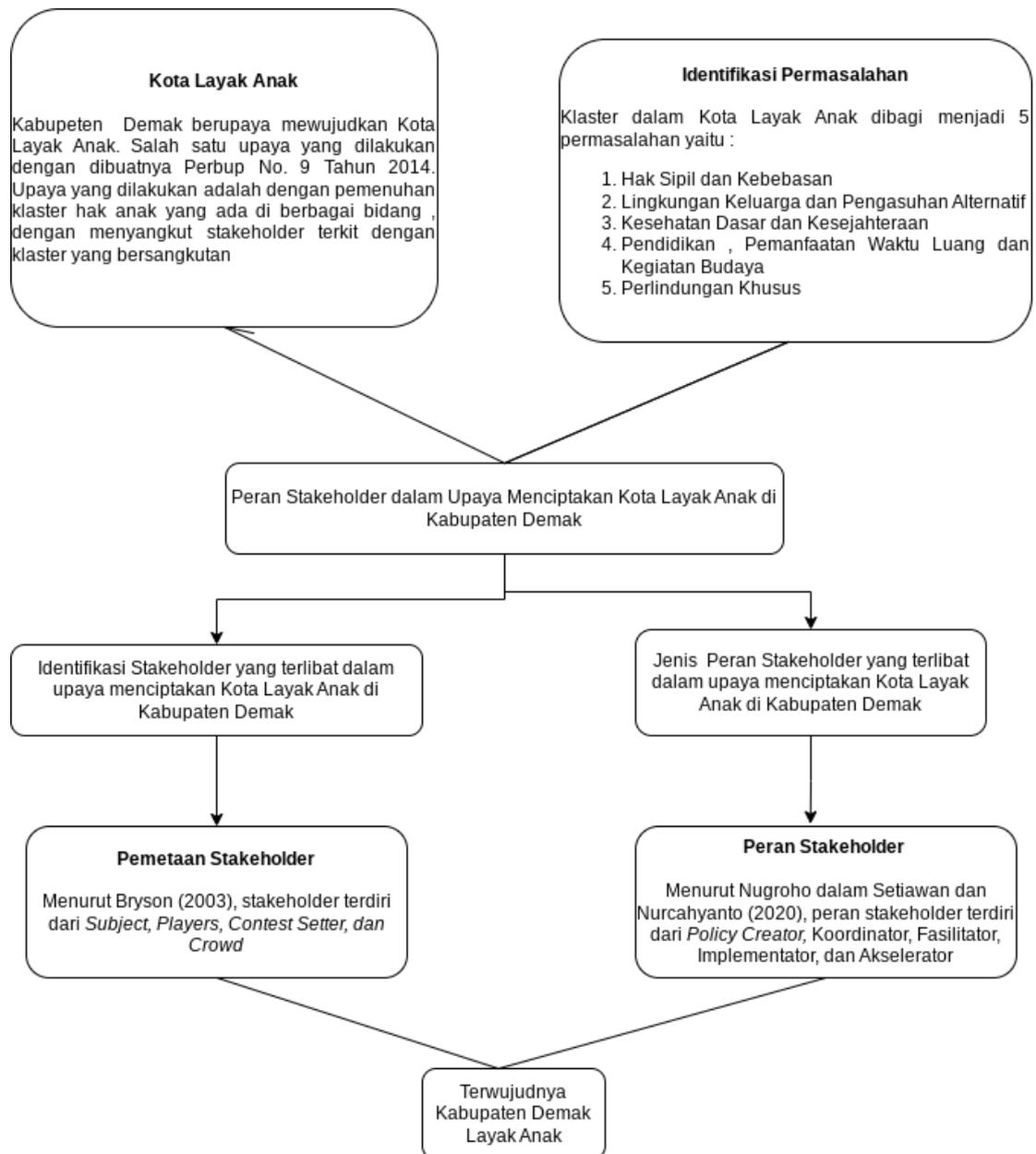
Secara umum tujuan dan sasaran kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak yaitu sebagai upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak Tujuan lainnya secara khusus ialah upaya membangun ide gagasan pemerintahan daerah khususnya kabupaten / kota menuju pada usaha modifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari konteks hukum menjadi bahan , rencana dan campur tangan pembangunan , berupa program pembangunan yang bertujuan agar pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA) , pada suatu wilayah kabupaten / kota terpenuhi .

Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak mengklasifikasikan indikator pemenuhan hak anak pada enam aspek / klaster , yang meliputi aspek penguatan kelembagaan dan lima klaster hak anak , diantaranya :

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

5. Perlindungan khusus

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian terkait Analisis Stakeholder dalam Upaya Menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak menggunakan definisi operasional sebagai berikut :

Stakeholder meliputi individu atau kelompok yang saling mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu tujuan organisasi, proyek yang sedang dilakukan ataupun kebijakan. Fenomena yang dikaji peneliti terkait dengan identifikasi dalam upaya menciptakan kota layak anak yaitu aspek subject , key palyer, contest setter, dan crowd

Peran stakeholder merupakan kedudukan yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Fenomena yang dikaji peneliti terkait dengan peran stakeholder dalam upaya menciptakan kota layak anak yaitu aspek policy creator, koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator

Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan kabupaten / kota yang berlandaskan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

Tabel 1. 3 Tabel Pembagian Stakeholder

Tujuan	Fenomena	Gejala
Stakeholder yang terlibat (Identifikasi Stakeholder)	Subject	Kekuasaan yang diberikan oleh setiap pemangku kepentingan : Otoritas dalam pembentukan program Fasilitas perwujudan program Mempengaruhi pihak lain dalam membentuk
	Players	
	Crowd	
	Contest Setter	

		<p>program</p> <p>Kepentingan yang diberikan oleh setiap pemangku kepentingan :</p> <p>Kepentingan utama yang melatarbelakangi stakeholder terlibat</p> <p>Keuntungan atau manfaat yang diperoleh stakeholder</p> <p>Kepentingan lain yang dapat menghambat pelaksanaan program</p>
Peran Stakeholder	Policy Creator	Pihak yang berperan dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan
	Koordinator	Pihak yang berperan melaksanakan koordinasi dengan stakeholder lain Bentuk koordinasi yang dilakukan dengan stakeholder lain
	Fasilitator	Pihak yang berperan dalam memberikan fasilitas dalam Kota Layak Anak di Kabupaten Demak Bentuk fasilitas yang diberikan
	Implementator	Pihak yang berperan dalam melaksanakan Upaya Menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak
	Akselerator	Pihak yang berperan dalam mendorong percepatan pelaksanaan Upaya Menciptakan Kota

		Layak Anak di Kabupaten Demak Bentuk kontribusi yang dilakukakan dalam mendorong percepatan menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak
--	--	---

Sumber : Diolah oleh Peneliti

1.8 Argumen Penelitian

Kabupaten Demak merupakan salah satu dari 29 Kabupaten di Jawa Tengah yang sudah memiliki penghargaan KLA di tingkat Madya, yang tiga tahun sebelumnya hanya mendapatkan predikat Pratama. Kabupaten Demak sendiri sudah secara substansial dari tahun 2011 menerapkan jalannya indikator Kota Layak Anak, tetapi baru mengalami perkembangan dan usaha dari tahun 2019 - 2023 . Sebagai salah satu kabupaten di Pesisir Laut Jawa Utara sangat penting sekali menerapkan pentingnya Kabupaten Layak Anak terhadap hak - hak anak yang menyangkut berbagai klaster yang juga setiap tahun memiliki masalah yang beragam dan kompleks .

Berbagai kajian telah dibaca oleh peneliti, permasalahan setiap klaster menyangkut banyak hal. Dari klaster hak sipil dan kebebasan permasalahan yang paling utama adalah sebaran Kartu Indonesia Anak dan juga kepemilikan Akte Kelahiran. Kemudian dari klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menyangkut presentase perkawinan anak usia 19 tahun, ketersediaan lembaga konsultasi pengasuhan dan perawatan anak, dan tersedianya program pengasuhan berkelanjutan. Selanjutnya dari kesehatan dasar dan kesejahteraan menyangkut angka kematian bayi, presentase puskesmas layak anak, presentase posyandu remaja. Lalu untuk klaster pendidikan , pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan kebudayaan permasalahan yang utama adalah presentase sekolah ramah anak, tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah, serta angka putus sekolah. Yang terakhir yaitu klaster perlindungan

khusus permasalahan yang utama yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, presentase anak yang mengalami kekerasan, dan bentuk pekerjaan terburuk terhadap anak.

Adanya peran dan partisipasi dari berbagai stakeholder diharapkan dapat melengkapi peran yang sudah dilakukan pemerintah. Diharapkan dengan adanya keterlibatan berbagai stakeholder dalam menciptakan kota layak anak, dapat terwujud sehingga substansi Kota Layak Anak terhadap anak semakin terlihat

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip dengan sabar dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Penelitian merupakan proses atau langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh jawaban atas pemecahan masalah atas pertanyaan dari fenomena-fenomena yang ada. Dalam suatu penelitian metode sangat diperlukan untuk pencapaian suatu penelitian

Metode penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan suatu makna peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti. Penelitian kualitatif bertujuan memahami objek penelitian dengan lebih mendalam.

Pada dasarnya tipe penelitian dibagi menjadi 2 macam:

1. Penelitian Deskriptif, merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuan utamanya menyajikan gambaran lengkap tentang setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena, dengan cara mendeskripsikan beberapa variabel yang berkenaan dengan masalah tertentu

2. Penelitian Eksploratif, merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk menggali data dan informasi dengan topik atau fenomena baru yang ditunjukkan. Tujuan penelitian eksploratif untuk merumuskan pernyataan-pernyataan yang lebih akurat.

Berdasarkan jenis penelitian yang dikemukakan, peneliti termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif, data yang diambil berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai fenomena yang ada. Laporan penelitian nantinya akan berupa kutipan-kutipan untuk memperoleh gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, atau dokumen resmi lainnya.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan situs penelitian di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Penelitian ini mengambil tentang “ Analisis Stakeholder dalam Upaya Menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak “.

1.9.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian deskriptif kualitatif informan penelitian ini ada 9 yaitu perwakilan Dinsos P2PA, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, perwakilan Forum Anak Demak, perwakilan Bappedalitbang Kabupaten Demak, perwakilan Unit PPA Polres Demak, dan perwakilan salah satu desa layak anak yaitu Desa Tempel. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu informan menguasai masalah, memiliki data dan memberikan pernyataan secara akurat, menurut (Sugiyono, 2012:218-219).

Penelitian ini juga memungkinkan untuk mengambil snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dikarenakan dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain untuk dijadikan sumber data

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data yang diperoleh atau diambil langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1. 4 Narasumber

No.	Narasumber
1.	Subkoor Bidang Kualitas Hidup Anak dan Kasi Perlindungan Anak Dinas Sosial , Perlindungan Perempuan dan Anak (P2PA)
2.	Pembina Bidang Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) Kemenag
3.	Ketua Forum Anak Demak
4.	Staff Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Demak
5.	Kepala Bidang PAUD /PNF dan Kepala Bidang SD/ SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Bintara Unit PPA Polres Demak
7.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8.	Subkoor Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
9.	Sekretaris Desa Tempel

2. Data Sekunder

Data tidak langsung yang diperoleh dari sumbernya, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Bentuk data sekunder yang diperoleh berupa data dispensasi nikah usia muda, data persebaran KAI, data persebaran Akte Kelahiran, dan data lainnya

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan terhadap gejala dan permasalahan yang diteliti. Bentuk observasi yang dilakukan peneliti yaitu tentang siapa saja stakeholder yang terlibat dalam upaya menciptakan kota layak anak dan peran apa saja yang dilakukan stakeholder tersebut.

2. Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2017:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengaitkan masalah yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam.

Melalui teknik wawancara ini, peneliti menggali informasi secara lebih mendalam dari informan mengenai bagaimana menciptakan kota layak anak melalui stakeholder yang terlibat, serta peran apa saja yang sudah dilakukan stakeholder dengan interview guide.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, bagan, dan sebagainya.

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen berupa catatan, rekaman, foto dari informan antara lain yaitu perwakilan Dinsos P2PA, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, perwakilan Forum Anak Demak, perwakilan Bappedalitbang Kabupaten Demak, perwakilan Unit PPA Polres Demak, dan perwakilan salah satu desa layak anak yaitu Desa Tempel yang terlibat dalam menciptakan kota layak anak di Kabupaten Demak

1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Dalam mengelola data kualitatif dilakukan melalui analisis data di lapangan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:247) yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi akan mengerucut semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data ini direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan yang bersifat deskriptif.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:252) adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

1.7.7 Kualitas Data (Goodness Criteria)

Pada penelitian kualitatif harus dapat menunjukkan data yang valid dan reliabel dengan melakukan uji keabsahan data. Validitas ini didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.

Dalam menentukan keabsahan data atau validitas data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk pengecekan sesuatu sebagai pembanding terhadap data itu dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Pada penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi yang digunakan melingkupi triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji data dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji data dengan cara mengecek data kepada sumber yang ada dengan teknik yang berbeda, seperti wawancara yang kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi, dan kuesioner